BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Melihat permasalahan dan situasi dalam beberapa tahun terakhir, banyak laporan keuangan lembaga daerah di Indonesia telah meraih predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP), namun masih terdapat permasalahan yang harus diselesaikan dan diupayakan oleh masing-masing daerah.

Hal ini dibuktikan dengan laporan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Kudus yang secara konsisten mendapat predikat WTP yang diberikan oleh Bapak Hari Wiwoho perwakilan BPK RI Jawa Tengah (Yandip, 2023). Tetapi terdapat beberapa evaluasi dari BPK agar menjadi lebih baik lagi. Permasalahan yang masih harus ditindaklanjuti setiap daerah meliputi aset tetap yang belum bersertifikat, pengamanan aset yang belum tercatat dan aset yang tidak ditemukan. Selain itu, sering terjadi permasalahan terkait pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan piutang yang tidak tertib meliputi piutang pajak dan retribusi (Yandip, 2023).

Di era reformasi yang berlangsung saat ini di Indonesia masyarakat menuntut supaya pemerintah mampu mengelola pengelolaan keuangan daerah dengan baik. Dengan majunya perkembangan teknologi saat ini, pemerintah juga perlu memberikan informasi kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui pengelolaan keuangan dan berhak menuntut pertanggungjawaban atas pelaksanaannya. Sebagai pihak yang mempercayai pemerintahnya, masyarakat

mempunyai hak atas informasi keuangan sebagai bagian dari akuntabilitas (Yusriwati, 2021).

Akuntabilitas bisa juga disebut sebagai suatu pertanggung jawaban yang mana dilaksanakan pada suatu instansi dimana pihak yang memiliki kepentingan mengharuskan bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuatnya dan yang telah dikerjakannya, sedangkan pengelolaan keuangan daerah ialah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, ketatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (PP No 12 Tahun 2019). Masyarakat meminta kepada pemerintah untuk melaporkan hasil segala program yang telah dilaksanakannya, sehingga masyarakat dapat menilai atas apa yang telah dikerjakan pemerintah apakah sudah ekonomis, efisien, dan efektif. Terdapat beberapa perspektif yang dapat dilihat dari akuntabilitas, antara lain perspektif akuntansi, perspektif fungsional, dan perspektif sistem akuntabilitas (Yusriwati, 2021).

Dalam bidang kelompok pemerintah, akuntabilitas publik dimaknai sebagai suatu pemberi informasi dan penyingkapan atas kegiatan dan kinerja finansial pemerintah terhadap pihak yang memiliki kepentingan dengan laporan itu. Transparansi mengenai akuntabilitas keuangan daerah merupakan salah satu pertanggung jawaban pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah yang harus dipublikasi secara terbuka terhadap media dengan rupa laporan keuangan yang mudah diakses oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan tujuan agar masyarakat punya hak untuk mengetahui laporan itu. Kelompok sektor publik adalah kelompok yang mengenakan sumber dana publik, sehingga

dengan hal tersebut kelompok sektor publik harus mengasih pertanggung jawaban atas laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas. Pemerintah daerah harus dapat membuat laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi yang umum dan memenuhi karakteristik dari laporan keuangan (Khairat, 2019).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Faktor pertama yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyajian laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan dapat disebut sebagai hal yang sangatlah penting, pembeberan atas informasi ini adalah suatu elemen mendasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. Fungsi penyajian laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan suatu perusahaan selama periode pelaporan (Peraturan Pemerintah RI No 24 Tahun 2005). Penyajian laporan keuangan yang kompleks dan mudah diakses bagi pengguna informasi menjamin tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut (Rahma, 2017).

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan suatu pertanggungjawaban dari Kepala Daerah, Gubernur/Bupati/Walikota yang ditunjuk sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Tetapi, perlu untuk dimengerti bahwa LKPD adalah output dari suatu sistem akuntansi yang tidak terlepas dari perputaran pengelolaan keuangan daerah, yang dimulai dari perencanaan, penganggaran (penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD), pelaksanaan APBD, pengawasan hingga pertanggungjawaban APBD, sehingga berfungsi untuk

penguraian secara komprehensif penyebab dari adanya suatu opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD (Dewi, 2018).

Faktor kedua yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah aksesibilitas laporan keuangan. Aksesibilitas mempunyai keikutsertaan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Suatu laporan dapat dibidang memiliki aksesibilitas yang efektif apabila laporan tersebut memudahkan bagi pemakai laporan keuangan untuk mengakses laporan keuangan pemerintah. Pemerintah sendiri harus mampu memudahkan jalan akses bagi pemakai laporan keuangan atau berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan harapan bahwa masyarakat yang sudah mempercayakan kepada pemerintah atas pengelolaan dana publik juga mempunyai hak untuk mengetahui informasi tersebut (Kurniawan & Rahayu, 2019).

Faktor ketiga yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sistem pengendalian internal. Dalam pengatisipasian terjadinya penyalahgunaan jangka panjang dalam penggunaan laporan keuangan, maka pemerintah menuntut untuk diadakannya pengendalian internal yang dilakukan di seluruh lingkungan pemerintahan, baik itu di pusat maupun di daerah. Sehingga pemerintah mengumumkan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang mengatur sistem pengendalian pemerintah yang mengacu pada konsep pengendalian intern (Mulyanto et al., 2021).

Dengan adanya sistem pengendalian intern pemerintah yang kuat dan baik maka tanggung jawab fiskal pemerintah daerah diperkirakan akan semakin meningkat di masa depan. Tingkatan keberhasilan suatu sistem pengendalian intern dapat dinilai dari Good Government Governance (GGG) yang baik, yang terlihat dalam laporan kinerja pemerintahan dicantumkan dalam laporan keuangan pemerintah yang akuntabel, yang selanjutnya akan diteliti oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta diteruskan dengan adanya opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan pemerintah wajib dipenuhi oleh kriteria laporan keuangan yang berkualitas, dicantumkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan PP No. 12 Tahun 2019, diantaranya adalah keandalan, relevan, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Pemenuhan karakteristik tersebut, sebagai akuntabilitas atau pertanggungjawaban suatu daerah atas pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan kebijakan yang ditetapkan (Mahmudi, 2016).

Dalam membentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukannya upaya dari pemerintah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai penggunaan keuangan daerah secara disiplin dan penggunaan anggaran dijalankan secara efektif dan efisien. Dalam pengelolaan keuangan daerah diperlukannya standar akuntansi pemerintah yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bisa diterima secara publik. Pelaporan keuangan yang dijalankan pemerintah harus disetujui dengan adanya bukti-bukti administrasi yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai kemudahan pelaporan (Fauziah, 2017).

Faktor keempat yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sistem akuntansi keuangan daerah. Keberadaan sistem akuntansi keuangan daerah sangatlah penting dan mempunyai peranan yang sangat kompleks sehingga memerlukan pengawasan oleh pemerintah daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dirancang untuk memberikan dukungan berkelanjutan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan laporan akuntansi keuangan daerah. Pemaksimalan sistem akuntansi keuangan daerah dapat dilaksanakannya dengan diberikannya informasi dan pembeberan atas kinerja keuangan pemerintah. Sistem akuntansi keuangan daerah dituntut untuk melakukan perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan agar dapat terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik (R. B. Purba, 2019).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yusriwati, 2021), ada beberapa perbedaan penelitian yaitu (1) Penambahan variabel Sistem Pengendalian Internal. Alasan menambah variabel sistem pengendalian internal karena sistem pengendalian internal dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjalankan pengendalian yang lebih efektif. Sistem pengendalian internal berfungsi memberikan keyakinan untuk terciptanya efektifitas dan juga efisiensi dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan, serta keandalan laporan keuangan, pengamanan aset, ketaatan terhadap undang – undang dan mendukung terciptanya akuntabilitas. Kemudian, (2) Penambahan variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Alasan menambah variabel sistem akuntansi keuangan daerah karena dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah ini dapat mempermudah dalam memberikan informasi yang

diperlukannya dalam rangka pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan mempermudah dalam melakukan pengendalian yang efektif. Kemudian, (3) objek pada penelitian yang dilakukan tak sama, yaitu peneliti melakukan penelitian pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Kudus, sedangkan pada penelitian (Yusriwati, 2021) melakukan penelitian pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dan terdapatnya inkonsistensi dari penelitian terdahulu, maka peneliti berminat untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah” (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kudus).**

1.2. Ruang Lingkup

Berikut ini ruang lingkup dalam penelitian:

1. Variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan sistem akuntansi keuangan daerah.
2. Variabel dependen yang dipakai dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Objek penelitian ini yaitu OPD Kabupaten Kudus.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskannya di atas, maka dibuatkanlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kudus?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kudus?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kudus?
4. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kudus?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji secara empiris pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di OPD Kabupaten Kudus.
2. Menguji secara empiris pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di OPD Kabupaten Kudus.
3. Menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di OPD Kabupaten Kudus.
4. Menguji secara empiris pengaruh sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di OPD Kabupaten Kudus.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, berikut ini kegunaan dari penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dilaksanakan dengan besar harapan untuk dijadikan sebagai bahan panduan, pertimbangan, referensi, sumbangan, dan pelengkap pada penelitian yang sesama jenis, yaitu pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Peneliti juga berharap agar hasil yang didapatkan dari penelitian ini dapat dijadikan generalisasi pada penelitian yang sesama jenis dengan menambahkan beberapa objek yang berbeda.

2. Kontribusi Praktis

a. Untuk OPD Kabupaten Kudus

Peneliti berharap penelitian ini dapat dipertimbangkan dan dapat digunakan oleh OPD sebagai bahan referensi dan sebagai pedoman serta menambah wawasan dalam membuat suatu laporan keuangan yang benar dan relevan dan andal serta meminimalisir kesalahan.

b. Bagi Pemerintah Pusat

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat dipertimbangkan dan bisa dipergunakan oleh pemerintah sebagai bahan acuan, panduan untuk mendukung adanya suatu opini atau tingkatan kewajaran dari laporan keuangan daerah.